

DPRD Desak Bentuk Pansus Aset

PONTIANAK, TRIBUN - Ketua Fraksi Golkar Awang Sofian Razali mengatakan, temuan BPK terkait aset Pemprov Kalbar seharusnya disikapi bijaksana oleh Pimpinan DPRD. Dalam arti, Pimpinan DPRD tidak lagi menutup mata untuk segera membentuk Pansus Aset.

"Persoalan aset itu memang benar ada dan Gubernur juga mengakui tidak tertata dengan baik. Ketika BPK masuk, tentu fakta menemukan permasalahan," kata Awang usai rapat paripurna pandangan Badan Anggaran DPRD terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD Tahun 2010, Kamis (4/8).

Dikatakan hampir semua fraksi menginginkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan ingin menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Persoalan aset muncul pada 2010 demikian juga 2009 dan 2008. Artinya selama ini manajemen aset ini lemah

Dikatakannya, dulu Kalbar memiliki lembaga penilai (Aset), tetapi tindak lanjutnya tidak ada. Persoalan aset perlu diseriisi dan Guber-

■ Bersambung ke Hal. 15

DPRD Desak Bentuk Pansus Aset

Sambungan Hal. 9

nur akan mengajak SKPD untuk kritisi ini.

"Kita ingin mengatur pemerintahan ini harus berpegang kepada Undang-Undang dan peraturan. Ketika ada persoalan aset itu, kerjasamakan segala macam, itu sepanjang dilakukan melalui mekanisme tidak bertentangan dengan Undang-Undang, itu dibolehkan," kata dia.

Namun, tidak mungkin, ketika ada pelimpahan aset, pelepasan aset, atau pengker-

jan sama dengan pihak lain tanpa persetujuan mekanisme dalam peraturan-peraturan yang mengatur persoalan aset.

Di tempat yang sama Ketua Fraksi Demokrat Ary Pudyanti mengungkapkan persoalan aset sudah muncul sejak 2010. "Seharusnya BPK jalan, DPRD juga jalan, karena ini masalah *complicated*. Mayoritas semua dewan menyoroti kesemrawutan masalah aset itu sendiri," kata dia.

Dikatakan, sudah sepantas-

nya permohonan 21 anggota DPRD untuk mendorong Pansus segera terealisasi. Selain masalah penyusutan, nilai ekonomis, kerjasama pihak ketiga sampai saat ini kita belum tahu.

Hal senada disampaikan Tony Kurniadi, anggota DPRD dari Fraksi PAN. Ia menegaskan persoalan aset harus segera dibentuk Pansus Aset. Mengingat persoalan aset menjadi kendala Laporan APBD Kalbar hanya WDP. (rhd)